



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI F NOMOR 681**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian ADD untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri A Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri F Nomor 671);

MEMUTUSKAN... /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

(1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Minimal yang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

b. Alokasi ... /

- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa yang PNS;
 - c. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa
 - e. Biaya BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - f. Biaya Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah data yang digunakan pada perhitungan Alokasi Formula Dana Desa.

Pasal 4

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40%... /

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing Desa Tahun 2020.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Maret; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran.. /

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti... /

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI F NOMOR 681

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	012	SIMANINDO						
1	1217012001	TOMOK	354,687,600	6,402,000	361,089,600	23,330,500	12,377,700	396,797,800
2	1217012002	SIHUSAPI	332,690,400	7,381,000	340,071,400	13,219,100	7,013,300	360,303,800
3	1217012003	MADUMA	332,690,400	8,986,000	341,676,400	12,487,000	6,624,800	360,788,200
4	1217012004	DOSROHA	332,690,400	8,060,000	340,750,400	13,361,000	7,088,500	361,199,900
5	1217012005	AMBARITA	332,690,400	4,555,000	337,245,400	19,541,600	10,367,600	367,154,600
6	1217012006	MARTOBA	382,690,400	7,361,000	390,051,400	18,689,300	9,915,400	418,656,100
7	1217012007	GAROGA	332,690,400	5,800,000	338,490,400	22,089,600	11,719,400	372,299,400
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	332,690,400	6,239,000	338,929,400	18,708,700	9,925,700	367,563,800
9	1217012009	CINTA DAME	354,687,600	7,705,000	362,392,600	19,648,300	10,424,200	392,465,100
10	1217012010	HUTAGINJANG	354,687,600	6,550,000	361,237,600	14,122,200	7,492,400	382,852,200
11	1217012011	PARDOMUAN	332,690,400	12,133,000	344,823,400	13,662,700	7,248,600	365,734,700
12	1217012012	PARMONANGAN	332,690,400	13,139,000	345,829,400	19,416,800	10,301,300	375,547,500
13	1217012013	PARBALOHAN	382,690,400	12,530,000	395,220,400	13,408,000	7,113,500	415,741,900
14	1217012014	TANJUNGAN	332,690,400	7,626,000	340,316,400	16,053,000	8,516,700	364,886,100
15	1217012015	SIMARMATA	332,690,400	4,632,000	337,322,400	19,127,300	10,147,800	366,597,500
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	332,690,400	17,905,000	350,595,400	26,991,600	14,320,100	391,907,100
17	1217012018	MARLUMBA	332,690,400	5,439,000	338,129,400	19,988,300	10,604,600	368,722,300
18	1217012019	SIMANINDO	353,690,400	5,285,000	358,975,400	18,571,100	9,852,700	387,399,200
19	1217012020	UNJUR	332,690,400	9,399,000	342,089,400	27,525,400	14,603,300	384,218,100
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	332,690,400	9,695,000	342,385,400	13,803,900	7,323,500	363,512,800
	JUMLAH		6,840,799,600	166,822,000	7,007,621,600	363,745,400	192,981,100	7,564,348,100
	022	ONAN RUNGGU						
21	1217022001	PAKPAHAN	332,690,400	5,718,000	338,408,400	13,213,300	7,010,200	358,631,900
22	1217022002	HUTA HOTANG	332,690,400	6,303,000	338,993,400	19,484,000	10,337,000	368,814,400
23	1217022003	SITINJAK	332,690,400	7,061,000	339,751,400	19,135,000	10,151,900	369,038,300
24	1217022004	PARDOMUAN	332,690,400	5,566,000	338,256,400	17,603,000	9,339,100	365,198,500
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	382,690,400	6,728,000	389,418,400	10,675,700	5,663,900	405,758,000
26	1217022006	RINA BOLAK	333,673,800	6,223,000	339,896,800	13,301,300	7,056,900	360,255,000
27	1217022007	ONAN RUNGGU	333,673,800	22,726,000	356,399,800	12,802,000	6,791,900	375,993,700
28	1217022008	SITAMIANG	332,690,400	4,821,000	337,511,400	11,588,000	6,147,900	355,247,300
29	1217022009	JANJI MATOGU	332,690,400	6,278,000	338,968,400	12,332,600	6,542,900	357,843,900
30	1217022010	SILIMA LOMBU	306,073,800	9,252,000	315,325,800	9,241,700	4,903,100	329,470,600
31	1217022011	SIPIRA	354,687,600	8,978,000	363,665,600	17,658,400	9,368,500	390,692,500
32	1217022012	HARIAN	333,673,800	7,520,000	341,193,800	12,683,500	6,729,100	360,606,400
	JUMLAH		4,040,615,600	97,174,000	4,137,789,600	169,718,500	90,042,400	4,397,550,500
	032	NAINGGOLAN						
33	1217032001	PANGALOAN	332,690,400	6,194,000	338,884,400	12,708,000	6,742,200	358,334,600
34	1217032002	HUTARIHIT	332,690,400	7,856,000	340,546,400	10,645,600	5,647,900	356,839,900
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	332,690,400	37,164,000	369,854,400	17,425,000	9,244,600	396,524,000
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	332,690,400	7,521,000	340,211,400	14,202,300	7,534,900	361,948,600
37	1217032005	PANANGGANGAN	332,690,400	11,328,000	344,018,400	12,535,000	6,650,400	363,203,800
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	383,673,800	5,430,000	389,103,800	11,163,600	5,922,700	406,190,100
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	382,690,400	19,408,000	402,098,400	10,712,300	5,683,300	418,494,000
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	332,690,400	21,929,000	354,619,400	12,909,800	6,849,100	374,378,300
41	1217032009	NAINGGOLAN	332,690,400	29,224,000	361,914,400	13,673,300	7,254,200	382,841,900
42	1217032010	PASARAN I	332,690,400	3,991,000	336,681,400	10,476,000	5,557,900	352,715,300
43	1217032013	PANANGGANGAN II	332,690,400	14,148,000	346,838,400	12,492,900	6,627,900	365,959,200
44	1217032014	SIPINGGAN	332,690,400	15,716,000	348,406,400	14,365,000	7,621,200	370,392,600
45	1217032015	JANJI MARAPOT	332,690,400	6,861,000	339,551,400	10,559,300	5,602,100	355,712,800
	JUMLAH		4,425,958,600	186,770,000	4,612,728,600	163,868,100	86,938,400	4,863,535,100

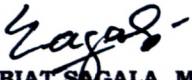
NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	042	PALIPI						
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	307,057,200	5,371,000	312,428,200	10,929,400	5,798,500	329,156,100
47	1217042002	GORAT PALLOMBUEAN	332,690,400	5,998,000	338,688,400	10,844,500	5,753,400	355,286,300
48	1217042003	URAT II	332,690,400	7,020,000	339,710,400	13,864,700	7,355,800	360,930,900
49	1217042004	PALIPI	354,687,600	5,228,000	359,915,600	19,437,300	10,312,200	389,665,100
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	333,673,800	9,388,000	343,061,800	10,211,700	5,417,700	358,691,200
51	1217042006	HATOGUAN	332,690,400	6,805,000	339,495,400	11,324,000	6,007,800	356,827,200
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	355,671,000	8,121,000	363,792,000	21,022,000	11,153,000	395,967,000
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	332,690,400	5,010,000	337,700,400	10,896,000	5,780,700	354,377,100
54	1217042009	URAT TIMUR	306,073,800	4,522,000	310,595,800	12,191,000	6,467,800	329,254,600
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	354,687,600	7,456,000	362,143,600	12,520,600	6,642,600	381,306,800
56	1217042011	PARSAORAN URAT	332,690,400	5,878,000	338,568,400	10,567,900	5,606,700	354,743,000
57	1217042012	HUTAGINJANG	307,057,200	21,083,000	328,140,200	11,309,500	6,006,700	345,456,400
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	375,687,600	6,281,000	381,968,600	13,232,600	7,020,400	402,221,600
59	1217042018	HUTADAME	332,690,400	13,805,000	346,495,400	10,880,800	5,772,700	363,148,900
60	1217042019	PALLOMBUEAN	332,690,400	3,932,000	336,622,400	10,417,700	5,527,000	352,567,100
61	1217042020	PAMUTARAN	306,073,800	7,911,000	313,984,800	10,155,400	5,387,800	329,528,000
62	1217042021	SIDEAK	332,690,400	6,577,000	339,267,400	12,063,400	6,400,000	357,730,800
	JUMLAH		5,662,192,800	130,386,000	5,792,578,800	211,868,500	112,410,800	6,116,858,100
	052	HARIAN						
63	1217052001	SOSOR DOLOK	306,073,800	4,959,000	311,032,800	10,370,200	5,501,800	326,904,800
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	332,690,400	40,000,000	372,690,400	12,381,600	6,568,900	391,640,900
65	1217052003	HARIARA POHAN	331,357,200	24,445,000	355,802,200	10,144,700	5,382,200	371,329,100
66	1217052004	DOLOK RAJA	332,690,400	6,065,000	338,755,400	9,987,300	5,298,700	354,041,400
67	1217052006	SAMPUR TOBA	332,690,400	5,402,000	338,092,400	11,552,700	6,129,200	355,774,300
68	1217052007	SIPARMAHAN	332,690,400	7,927,000	340,617,400	11,189,000	5,936,200	357,742,600
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	332,690,400	11,974,000	344,664,400	11,344,600	6,018,800	362,027,800
70	1217052009	TURPUK SAGALA	306,073,800	13,719,000	319,792,800	9,790,900	5,194,500	334,778,200
71	1217052010	TURPUK MALAU	306,073,800	4,850,000	310,923,800	11,003,600	5,837,800	327,765,200
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	306,073,800	14,916,000	320,989,800	11,899,200	6,313,000	339,202,000
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	306,073,800	5,767,000	311,840,800	10,125,500	5,372,000	327,338,300
74	1217052014	HUTAGALUNG	332,690,400	46,173,000	378,863,400	12,064,000	6,400,400	397,327,800
75	1217052015	HARIARA PINTU	332,690,400	36,952,000	369,642,400	16,109,200	8,546,500	394,298,100
	JUMLAH		4,190,559,000	223,149,000	4,413,708,000	147,962,500	78,500,000	4,640,170,500
	062	SIANJUR MULA MULA						
76	1217062001	HUTA GINJANG	332,690,400	7,317,000	340,007,400	8,865,700	4,703,600	353,576,700
77	1217062002	SINGKAM	332,690,400	16,405,000	349,095,400	10,917,200	5,792,000	365,804,600
78	1217062003	HASINGGAAN	333,673,800	7,821,000	341,494,800	11,415,200	6,056,200	358,966,200
79	1217062004	AEK SIPTUDAI	332,690,400	4,009,000	336,699,400	12,363,600	6,559,400	355,622,400
80	1217062005	HUTA GURGUR	332,690,400	7,692,000	340,382,400	11,436,700	6,067,600	357,886,700
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	332,690,400	18,516,000	351,206,400	11,093,600	5,885,600	368,185,600
82	1217062007	BOHO	332,690,400	8,040,000	340,730,400	10,504,800	5,573,200	356,808,400
83	1217062008	SIBORO	332,690,400	6,024,000	338,714,400	13,301,300	7,056,900	359,072,600
84	1217062009	SARIMARRIHIT	332,690,400	6,904,000	339,594,400	11,080,600	5,878,700	356,553,700
85	1217062010	GINOLAT	333,673,800	19,541,000	353,214,800	11,933,000	6,331,000	371,478,800
86	1217062011	BONAN DOLOK	332,690,400	5,744,000	338,434,400	11,182,000	5,932,500	355,548,900
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	332,690,400	4,645,000	337,335,400	11,290,200	5,989,900	354,615,500
	JUMLAH		3,994,251,600	112,658,000	4,106,909,600	135,383,900	71,826,600	4,314,120,100
	072	RONGGUR NIHUTA						
88	1217072001	SALAON TOBA	332,690,400	4,368,000	337,058,400	15,619,400	8,286,700	360,964,500
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	354,687,600	6,568,000	361,255,600	12,109,000	6,424,300	379,788,900
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	353,690,400	21,056,000	374,746,400	11,298,800	5,994,500	392,039,700
91	1217072004	SALAON DOLOK	332,690,400	25,609,000	358,299,400	13,371,300	7,094,000	378,764,700
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	354,687,600	11,285,000	365,972,600	15,909,800	8,440,800	390,323,200
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	332,690,400	6,020,000	338,710,400	12,675,800	6,725,000	358,111,200
94	1217072007	PARADUAN	332,690,400	7,259,000	339,949,400	12,500,200	6,631,800	359,081,400
95	1217072008	SIJAMBUR	354,687,600	6,801,000	361,488,600	15,315,700	8,125,600	384,929,900
	JUMLAH		2,748,514,800	88,966,000	2,837,480,800	108,800,000	57,722,700	3,004,003,500

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	082	PANGURURAN						
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	306.073.800	6.713.000	312.786.800	12.543.400	6.654.700	331.984.900
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	354.687.600	5.640.000	360.327.600	18.100.900	9.603.200	388.031.700
98	1217082003	PARBABA DOLOK	332.690.400	9.808.000	342.498.400	16.372.700	8.686.400	367.557.500
99	1217082004	HUTA TINGGI	332.690.400	30.570.000	363.260.400	15.017.400	7.967.300	386.245.100
100	1217082005	PARHORASAN	332.690.400	8.484.000	341.174.400	11.678.300	6.195.800	359.048.500
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	306.073.800	6.815.000	312.888.800	12.473.500	6.617.700	331.980.000
102	1217082007	PARSAORAN I	332.690.400	14.909.000	347.599.400	19.363.400	10.273.000	377.235.800
103	1217082008	RIANIATE	354.687.600	6.116.000	360.803.600	16.814.900	8.920.900	386.539.400
104	1217082009	HUTA BOLON	306.073.800	18.266.000	324.339.800	16.734.800	8.878.400	349.953.000
105	1217082010	PANAMPANGAN	306.073.800	15.279.000	321.352.800	12.658.000	6.715.500	340.726.300
106	1217082011	PARDUGUL	306.073.800	4.220.000	310.293.800	14.727.000	7.813.300	332.834.100
107	1217082012	HUTA NAMORA	354.687.600	7.091.000	361.778.600	21.331.400	11.317.000	394.427.000
108	1217082013	PARLONDUT	306.073.800	3.731.000	309.804.800	19.620.500	10.409.400	339.834.700
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	354.687.600	5.545.000	360.232.600	14.302.000	7.587.800	382.122.400
110	1217082015	PARMONANGAN	332.690.400	4.813.000	337.503.400	14.793.000	7.848.300	360.144.700
111	1217082016	SAIT NIHUTA	306.073.800	3.730.000	309.803.800	14.194.700	7.530.800	331.529.300
112	1217082017	SITUNGKIR	356.073.800	3.560.800	359.634.600	12.710.800	6.743.600	379.089.000
113	1217082018	SIANTING-ANTING	306.073.800	22.670.000	328.743.800	12.450.600	6.605.500	347.799.900
114	1217082019	SIALANGUAN	306.073.800	13.033.000	319.106.800	18.165.000	9.637.300	346.909.100
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	306.073.800	16.135.000	322.208.800	10.044.000	5.328.700	337.581.500
116	1217082021	PARDOMUAN I	376.684.800	6.707.000	383.391.800	47.064.900	24.969.800	455.426.500
117	1217082022	SITOLU HUTA	306.073.800	16.929.000	323.002.800	12.957.000	6.874.300	342.834.100
118	1217082023	SINABULAN	356.073.800	5.186.000	361.259.800	13.511.900	7.168.600	381.940.300
119	1217082024	AEK NAULI	306.073.800	6.118.000	312.191.800	14.696.300	7.796.900	334.685.000
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	382.690.400	13.122.000	395.812.400	23.825.500	12.640.400	432.278.300
JUMLAH			8.226.610.800	255.190.800	8.481.801.600	416.151.900	220.784.600	9.118.738.100
	092	SITITOTIO						
121	1217092001	HOLBUNG	332.690.400	36.306.000	368.996.400	12.413.500	6.585.800	387.995.700
122	1217092002	JANJI RAJA	335.990.400	7.083.000	343.073.400	11.550.300	6.127.900	360.751.600
123	1217092003	SABULAN	332.690.400	5.263.000	337.953.400	11.593.600	6.150.800	355.697.800
124	1217092004	BUNTU MAULI	332.690.400	25.857.000	358.547.400	12.140.800	6.435.500	377.123.700
125	1217092005	TAMBA DOLOK	332.690.400	6.567.000	339.257.400	12.849.800	6.817.300	358.924.500
126	1217092006	CINTA MAJU	332.690.400	7.401.000	340.091.400	11.932.500	6.330.600	358.354.500
127	1217092007	PARSAORAN	332.690.400	6.709.000	339.399.400	10.330.900	5.480.900	355.211.200
128	1217092008	JANJIMARIA	332.690.400	7.437.000	340.127.400	11.471.300	6.086.000	357.684.700
JUMLAH			2.664.823.200	102.623.000	2.767.446.200	94.282.700	50.014.800	2.911.743.700
TOTAL			42.794.326.000	1.363.738.800	44.158.064.800	1.811.781.500	961.221.400	46.931.067.700

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI F NOMOR 681